

## Meninjau Kapasitas Makroekonomi dan Sosial Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Iffah Hafizhah<sup>1\*</sup>, Sanusi Fattah<sup>2</sup>, Nur Dwiana Sari Saudi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS). Indonesia.

[iffahfizah17@gmail.com](mailto:iffahfizah17@gmail.com)

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Hasanuddin. Indonesia.

[fattahsanusi@gmail.com](mailto:fattahsanusi@gmail.com)

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Hasanuddin. Indonesia.

[nurdwianasari@gmail.com](mailto:nurdwianasari@gmail.com)

\*E-mail Korespondensi: [iffahfizah17@gmail.com](mailto:iffahfizah17@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of economic growth, income disparity, Human Development Index (HDI), and fiscal capacity on poverty levels in districts and cities in South Sulawesi during the period 2010-2021. With a quantitative approach, the researcher collected secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. The data collected is a combination of time series data with cross sections which are summarized in a panel data format on an annual basis. Furthermore, the researcher conducted panel data regression in 24 districts/cities in South Sulawesi Province using a random effects approach or Random Effect Model. The results of the analysis concluded that economic growth, income disparity, HDI, and fiscal capacity simultaneously affect poverty rates. Partially, economic growth and HDI negatively affect poverty. Meanwhile, income inequality and fiscal capacity consisting of fiscal transfers and public spending have a positive and significant impact on poverty rates. As a recommendation, this study advises the local government of South Sulawesi to promote economic growth that involves the participation of the poor, ensure equitable distribution of health and education facilities, explore alternative sources of local revenue, and increase financial control over local government spending for poverty alleviation.*

*Keywords: Poverty, Economic Growth, Income Disparity, Human Development Index, Fiscal Capacity, South Sulawesi*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis determinan tingkat kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010-2021 yang dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kapasitas fiskal. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data yang dikumpulkan

berupa kombinasi data *time series* dengan *cross section* yang dirangkum ke dalam format data panel secara tahunan. Selanjutnya, peneliti melakukan regresi data panel pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan efek random atau *Random Effect Model*. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa secara simultan, variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, IPM, dan kapasitas fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara signifikan. Adapun secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif dan signifikan. Sedangkan ketimpangan pendapatan dan kapasitas fiskal yang terdiri atas transfer fiskal dan belanja publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Sebagai rekomendasi, studi ini menghimbau pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan partisipasi penduduk miskin, memastikan pemerataan sarana kesehatan dan pendidikan, menggali sumber pendapatan asli daerah alternatif, serta meningkatkan pengawasan keuangan terhadap belanja pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Kapasitas Fiskal, Sulawesi Selatan

## PENDAHULUAN

Menilik perkembangan kinerja perekonomian setiap tahunnya, kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah Sulawesi Selatan. Walaupun pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, tingkat kemiskinan masih bergerak secara fluktuatif. Melansir data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, selama periode 2010 hingga 2021 sebanyak 815,98 ribu jiwa penduduk Sulawesi Selatan tercatat dalam kelompok miskin<sup>1</sup>.

Tingkat kemiskinan rata-rata selama periode 2010-2021 tercatat sebesar 9,56 persen. Sementara secara rata-rata, tingkat kemiskinan pada 10 (sepuluh) kabupaten lebih tinggi dari tingkat kemiskinan provinsi, yaitu Kepulauan Selayar (13,24 persen), Kabupaten Jeneponto (15,83 persen), Kabupaten Maros (11,59 persen), Kabupaten Pangkep (16,16 persen), Kabupaten Tana Toraja (12,83 persen), Kabupaten Bone (11,17 persen), Kabupaten Luwu (13,77 persen), Kabupaten Enrekang (13,77 persen), Kabupaten Toraja Utara (14,83 persen), dan Kabupaten Luwu Utara (14,29 persen).

Adapun angka kemiskinan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19 sebagai dampak dari pembatasan aktivitas yang mengakibatkan pengurangan pekerja dari berbagai sektor perekonomian. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga memicu peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Data Badan Pusat Statistik membuktikan kenaikan sebesar 800,24 ribu jiwa penduduk miskin pada

September 2020, begitu pun jika dibandingkan September 2019 yang meningkat sebanyak 40,66 ribu jiwa<sup>1</sup>.

Adapun penduduk miskin di perkotaan maupun perdesaan juga meningkat selama periode September 2019 sampai September 2020. Masih melansir data BPS, peningkatan sebanyak 32,69 ribu jiwa (0.70 persen) terjadi di perkotaan, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan juga bertambah sebanyak 7,97 ribu jiwa atau sekitar 0.35 persen. Kenaikan angka kemiskinan pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan merupakan salah satu indikasi kurang efektifnya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah<sup>2</sup>.

Penelitian ini menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas yang menyebabkan kemiskinan, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan kapasitas fiskal. Studi ini difokuskan di Sulawesi Selatan sebagai poros utama perekonomian Kawasan Timur Indonesia. Sebagai gambaran efektivitas kebijakan fiskal daerah, penelitian ini memasukkan kapasitas fiskal sebagai variabel independen, mengingat masih sedikit penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap kemiskinan khususnya di Sulawesi Selatan.

Output dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penyebab fenomena kemiskinan pada kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan serta memberikan rekomendasi yang implementatif. Adapun bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian serupa, diharapkan mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain yang mampu menjelaskan fenomena kemiskinan dengan lebih komprehensif, baik dalam kajian terkait pengentasan kemiskinan di wilayah yang sama maupun di daerah lain di Indonesia.

**Kemiskinan.** Sharp, et. al. mendeskripsikan tiga faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan yang mengacu kepada Teori Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse tahun 1953<sup>3</sup>. Faktor pertama adalah kesenjangan distribusi pendapatan sebagai akibat dari ketimpangan akses sumber daya. Selain itu, produktivitas sumber daya manusia yang rendah menjadi faktor kedua yang menyebabkan minimnya jumlah upah yang diperoleh pekerja. Faktor tersebut merupakan dampak dari rendahnya pendidikan, faktor keturunan, maupun diskriminasi. Penyebab ketiga dari kemiskinan adalah terbatasnya akses modal oleh masyarakat miskin. Kondisi ini membawa pada penurunan produktivitas, yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima termasuk untuk keperluan tabungan dan investasi.

**Pertumbuhan Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah peningkatan jangka panjang dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>4</sup>. Adapun PDRB dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah yang mencakup jumlah nilai tambah (*value-added*) barang dan jasa yang terdiri dari PDRB nominal dan PDRB riil. PDRB nominal menghitung nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga berlaku (*current price*). Sedangkan nilai tambah barang dan jasa pada PDRB riil dihitung menggunakan harga konstan pada tahun dasar.

**Ketimpangan Pendapatan.** Ketimpangan pendapatan menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya kesenjangan distribusi pendapatan di masyarakat. Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan juga menjadi penyebab dari inefisiensi dan instabilitas ekonomi<sup>5</sup>. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, kesenjangan distribusi pendapatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berpengaruh pada penurunan taraf hidup masyarakat, walaupun pendapatan nasional per kapita negara tersebut tergolong tinggi. Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah umumnya menggunakan gini ratio. Gini ratio memiliki skala 0 sampai 1, dengan beberapa kategori ketimpangan. Koefisien gini ketimpangan rendah sebesar 0,20-0,35, ketimpangan sedang sebesar 0,36-0,49, dan ketimpangan tinggi sebesar 0,50-0,70<sup>6</sup>.

**Indeks Pembangunan Manusia.** Pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui investasi pada sumber daya manusia<sup>5</sup>. Sebagai indikator yang untuk mengukur aspek kualitas pengembangan manusia, peneliti menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merangkum tiga dimensi meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Angka harapan hidup menjadi indikator untuk mengukur dimensi kesehatan; dimensi pendidikan dinilai berdasarkan rata-rata tahun sekolah dan kemampuan baca tulis yang dilihat dari angka melek huruf; dan standar hidup layak diukur dari konsumsi per kapita berdasarkan nilai pengeluaran dan daya beli masyarakat. Upaya mendukung kualitas sumber daya manusia diwujudkan pemerintah dalam bentuk investasi pendidikan dan kesehatan, khususnya pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk mendorong produktivitas kerja yang akan membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kapasitas Fiskal.** Pemerintah memegang peranan kunci dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Melalui seperangkat regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan menjalankan roda pemerintahan menjadi otonomi pemerintah daerah,

termasuk untuk membiayai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, kapasitas fiskal merepresentasikan kemampuan anggaran daerah dalam mendanai berbagai aktivitas pemerintahan, pelayanan daerah, dan pembangunan. Dalam tataran praktis, setiap daerah memiliki tantangan masing-masing untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan cara menggali dan memaksimalkan berbagai pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dialokasikan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**Penelitian Terdahulu.** Penelitian mengenai determinan tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh Yudha<sup>7</sup>; Faturrohim<sup>8</sup>; Rustam<sup>9</sup>; dan Wijayanto<sup>10</sup> yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif dan signifikan. Namun, Barika justru tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan<sup>11</sup>. Temuan ini menjelaskan peranan konsumsi lebih besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dibandingkan investasi, serta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif. Investasi asing juga tidak memberikan dampak bagi ekspor pertanian (Mangilep dan Naim, 2021)<sup>12</sup>.

Khoirun Nisa mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa kesenjangan pendapatan menjadi salah satu variabel penentu kemiskinan di Bangka Belitung dengan arah pengaruh negatif dan signifikan<sup>13</sup>. Hasil senada ditemukan oleh Wijayanto bahwa ketimpangan pendapatan menjadi faktor penentu kemiskinan dengan mengambil sampel di Sulawesi Utara selama 2000-2010 [10]. Namun, Rustariyuni mengungkapkan hasil yang berbeda, yakni ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan kemiskinan, hasil ini mencerminkan pengaruh positif ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan<sup>14</sup>.

Kemudian, beberapa riset terkait pengaruh IPM terhadap kemiskinan dilakukan oleh Sofilda di provinsi Papua yang membuktikan pengaruh IPM yang negatif terhadap kemiskinan<sup>15</sup>. Selanjutnya, Napitupulu yang meneliti kemiskinan di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh indikator komposit IPM yang terdiri atas tiga dimensi dasar (kesehatan, pendidikan, dan konsumsi per kapita) dengan pengaruh yang negatif dan signifikan<sup>16</sup>. Wijayanto juga menyimpulkan dua variabel utama yang perlu mendapat perhatian serius untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu pendidikan dan kesehatan<sup>10</sup>. Namun, Susilowati dan Wahyudi menyatakan sebaliknya bahwa tidak ditemukan pengaruh variabel IPM yang menyebabkan kemiskinan pada penelitiannya mengenai determinan kemiskinan di Indonesia periode 1990-2013<sup>17</sup>.

Lebih lanjut, penelitian oleh Rauf menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kemiskinan<sup>18</sup>. Sriyana kemudian menguatkan dalam penelitiannya tentang kapasitas fiskal dan pengentasan kemiskinan di Yogyakarta menggunakan metode data panel selama periode tahun 2013 – 2016<sup>19</sup>. Hasil penelitian menjelaskan peran kapasitas fiskal pada kabupaten dan kota di Yogyakarta telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan variabel penentu mencakup belanja publik dan transfer fiskal. Di sisi lain, penelitian Pou, et al. tidak menemukan adanya pengaruh variabel kapasitas fiskal terhadap kemiskinan<sup>20</sup>.

Kajian mengenai kemiskinan di Sulawesi Selatan juga dilakukan oleh Azwar dan Subekan yang mengungkapkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan dipengaruhi secara simultan oleh pertumbuhan ekonomi regional, indeks kesehatan, pengangguran, angka partisipasi sekolah, dan pengeluaran pemerintah daerah<sup>21</sup>. Melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terjadi *inconsistency* dari studi empiris mengenai pengaruh beberapa faktor penentu kemiskinan di sejumlah daerah. Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini hadir sebagai bukti empiris yang baru terkait analisis determinan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2010-2021.

## METODOLOGI KAJIAN

**Jenis dan Sumber Data.** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penulis mengolah data sekunder yang ditabulasi ke dalam format data panel untuk kemudian dianalisis menggunakan metode tertentu. Hasil pengolahan data kemudian dipaparkan secara sistematis guna membuktikan hipotesis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

**Metode Pengumpulan Data.** Penelitian ini menggunakan data sekunder dari beberapa lembaga. Penulis mengumpulkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan untuk memperoleh angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun data Indeks Kapasitas Fiskal diakses dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. Data *time series* terdiri atas sebelas tahun dari tahun 2010-2021, adapun data *cross section* mencakup 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

**Metode Analisis Data.** Regresi data panel dipilih sebagai metode pengolahan data dalam penelitian ini. Gujarati menguraikan beberapa kelebihan metode ini, di antaranya lebih tepat

dalam mendeteksi dan mengukur efek, lebih efektif dibandingkan metode regresi data *time-series* atau *cross-section* dalam mengestimasi dinamika perubahan<sup>22</sup>. Lebih lanjut, metode ini juga menyediakan informasi yang lebih komprehensif, menghasilkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang bervariasi, kolinearitas antar variabel yang minim, serta lebih efisien dalam memproses output analisis.

Peneliti kemudian memilih satu dari 3 pilihan model regresi data panel, yaitu *random effect model* (REM), *fixed effect model* (FEM), dan *common effect model* (CEM). Model yang tepat dipilih melalui serangkaian uji sebelum melakukan regresi. Peneliti menyusun model persamaan regresi sebagai berikut sebelum melakukan serangkaian uji pemilihan model:

---


$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \tag{1}$$

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 UN_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 FIS_{it} + \mu_{it} \tag{2}$$


---

Dimana :

POV (Y) = Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

GRO (X1)= Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

INC (X2) = Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

IPM (X3)= Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

FIS (X4) = Indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

$\alpha_0$  = Konstanta / Intersep

$\beta_{,2,3,4}$  = Koefisien regresi variabel independen

$\mu_{it}$  = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i = 1,2,3, ..., 24 (data cross-section kabupaten/kota di Sulawesi Selatan)

t = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (data *time-series* tahun 2010-2021)

## HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

**Pengujian Model.** Dalam analisis regresi data panel, serangkaian proses pengujian perlu dilakukan untuk memilih model yang tepat antara CEM, FEM, atau REM. Peneliti melakukan Uji Chow sebagai tahapan uji pertama untuk menentukan model CEM atau FEM yang digunakan dalam regresi. Adapun hipotesis dari Uji Chow sebagai berikut:

1. Menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$  apabila nilai Prob.  $> 0,05$ , artinya CEM merupakan model yang terpilih.
2. Menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$  apabila nilai Prob.  $< 0,05$ , artinya FEM merupakan model yang terpilih.

Tabel 1. Output Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross-section Chi-square	0.0000

*Sumber: Output Eviews Versi 9*

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,00. Karena  $0,00 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan menyimpulkan *fixed effect* sebagai model yang terpilih. Pada langkah selanjutnya, peneliti menentukan model terbaik antara FEM atau REM melalui Uji Hausman. Adapun hipotesis dari Uji Hausman sebagai berikut:

1. Menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$  apabila nilai Prob.  $> 0,05$ , artinya REM merupakan model yang terpilih.
2. Menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$  apabila nilai Prob.  $< 0,05$ , artinya FEM merupakan model yang terpilih.

Tabel 2. Output Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.5781

*Sumber: Output Eviews Versi 9*



Output Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,57. Karena  $0,57 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak, dan menyimpulkan *random effect* sebagai model yang terpilih. Selanjutnya, peneliti memilih model terbaik antara REM atau CEM dengan melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari Uji LM adalah sebagai berikut:

1. Menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$  apabila nilai Prob.  $> 0,05$ , artinya CEM merupakan model yang terpilih.
2. Menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$  apabila nilai Prob.  $< 0,05$ , artinya REM merupakan model yang terpilih.

Tabel 3. Output Uji LM

Test Summary	Cross-section	Both
Breusch-Pagan	0.0000	0.0000

Sumber: Output Eviews Versi 9

Output Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,00. Karena  $0,00 < 0,05$ , maka kesimpulannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Setelah melakukan serangkaian uji, peneliti dapat menyimpulkan untuk menggunakan model *random effect* daripada *fixed effect*. Hasil pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa REM lebih baik dari FEM, maka dapat disimpulkan bahwa  $REM > FEM > CEM$ , sehingga *random effect model* terpilih dalam regresi data panel untuk penelitian ini.

**Hasil Regresi.** Peneliti menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melakukan regresi data panel. Melalui pendekatan *random effect*, peneliti memperoleh hasil estimasi yang dirangkum pada **Tabel 4 berikut**.

Tabel 4: Hasil Estimasi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.83336	1.730827	20.70303	0.0000
X1	-0.008169	0.015589	-1.524047	0.0007
X2	0.797554	1.404638	0.567800	0.0006
X3	-0.381990	0.021784	-17.53570	0.0000
X4	0.277074	0.094448	2.933609	0.0036
Adjusted R-Squared	0.583536	Prob. (F-Statistic)	0.000000	

Sumber: Olah Data Eviews, 2022

Dengan melakukan regresi data panel menggunakan model *random effect*, dihasilkan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y_{it} = 35.83336_{it} - 0.008169X1_{it} + 0.797554X2_{it} - 0.381990X3_{it} + 0.277074X4_{it} + e_{it}$$

Peneliti kemudian menarik kesimpulan terkait besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang mengacu pada output regresi. Adapun cara mengambil keputusan dalam uji signifikansi adalah sebagai berikut:

1. Menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$  jika nilai Prob. > 0,05, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$  jika nilai Prob. < 0,05, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, peneliti melakukan uji F untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Output regresi menghasilkan nilai probabilitas F sebesar 0,00. Karena  $0,00 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan menyimpulkan bahwa semua variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, IPM, dan ketimpangan fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Angka koefisien determinasi (R-Squared) sebesar 0.583536 menjelaskan bahwa kombinasi variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar

58,3%. Sedangkan 41,7% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**Diskusi.** Penjelasan hasil regresi memberi kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh yang negatif, dimana setiap penambahan 1 persen  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.008169 persen. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Manangkalangi dengan fokus studi di Sulawesi Tengah. Hasil tersebut sejalan dengan hipotesis penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan<sup>23</sup>. Hal tersebut juga didukung oleh teori *trickle-down effect*, yang mana pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penduduk miskin, sehingga akan memperkecil ketimpangan di antara penduduk kaya dan penduduk miskin di suatu wilayah. Adapun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mengalami tren peningkatan ditopang oleh pertumbuhan beberapa sektor utama. Di antara sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB daerah adalah sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian. Adapun beberapa sektor lain yang turut andil di antaranya sektor konstruksi, manufaktur, serta perdagangan besar dan eceran<sup>24</sup>.

Lebih lanjut, pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai positif dan signifikan sebagaimana output dari regresi, dimana setiap penambahan 1 persen  $X_2$  (ketimpangan pendapatan) akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0.797554 persen. Hubungan yang positif antara gini rasio dan tingkat kemiskinan mencerminkan bahwa jika distribusi pendapatan semakin merata, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Temuan yang sama diungkapkan Son dan Kakwani, dengan argumentasi bahwa pertumbuhan *pro-poor* di suatu wilayah akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang selanjutnya akan menurunkan kemiskinan dengan lebih cepat, meskipun pertumbuhan ekonomi masih dalam skala sedang (*moderate*)<sup>25</sup>. Dengan kata lain, pemerataan distribusi pendapatan berperan vital dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Studi serupa oleh Sasana juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan kesenjangan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan akan menurunkan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah, sehingga penurunan kesenjangan perlu diutamakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan<sup>26</sup>.

Adapun hasil regresi dari variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana setiap penambahan 1 persen  $X_3$  (IPM) akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.381990 persen. Jika melihat data IPM

Sulawesi Selatan tahun 2010 sebesar 66 persen, mengalami peningkatan menjadi 72.24 persen di 2021. Peningkatan pada IPM diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, dimana kemiskinan pada 2021 tercatat di angka 8,78 persen, menurun dari tahun 2010 sebesar 11,04 persen. Statistik tersebut mengindikasikan bahwa IPM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk melalui peningkatan produktivitas. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian ini bahwa semakin tinggi persentase IPM maka akan mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut, Saputra pada tahun 2011 melakukan penelitian determinan kemiskinan di Jawa Tengah dan menyimpulkan hasil yang senada bahwa kemiskinan akan menurun secara signifikan seiring peningkatan IPM, begitu pun sebaliknya<sup>27</sup>.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kanbur dan Squire bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui perluasan akses dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan. Penguatan di bidang kesehatan dan pendidikan sama pentingnya untuk mendorong sumber daya manusia yang produktif serta berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan dan pembangunan sosial ekonomi<sup>28</sup>. Adapun pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas di Sulawesi Selatan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 72,24 dan secara nasional berada pada peringkat 11. Sejak tahun 2017, pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berstatus tinggi. Sementara di Pulau Sulawesi, angka IPM Sulawesi Selatan berada pada posisi ke-2 setelah IPM Sulawesi Utara. Capaian ini merupakan angka akumulasi dari tiga komponen yang berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, yaitu harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Terakhir, kapasitas fiskal turut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi sebesar 0.277074 persen. Dengan kata lain, setiap penambahan 1 persen  $X_4$  (kapasitas fiskal) akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0.277074 persen. Hasil ini kemungkinan besar disebabkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang belum efektif. Argumentasi yang sama diungkapkan Pou, et al. yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan<sup>20</sup> Hasil tersebut juga menjelaskan fenomena ketimpangan pembangunan infrastruktur yang relatif terpusat di perkotaan, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat pedesaan dan tidak berdampak pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah perlu dilakukan

secara lebih efektif dan efisien serta menguatkan program pelayanan masyarakat dalam bentuk program subsidi, pemberdayaan keluarga maupun penciptaan lapangan kerja.

Di samping itu, penelitian Armawaddin pada tahun 2017 menemukan fenomena *flypaper effect* pada alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari pos Dana Alokasi Umum<sup>29</sup>. Merujuk ke teori *Bureaucratic Model*, *Flypaper Effect* merupakan implikasi dari perilaku pemerintah daerah yang cenderung bertumpu pada alokasi dana pemerintah pusat, sehingga kurang memaksimalkan penerimaan pajak dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah tersebut. Fenomena ini berpengaruh pada kemandirian daerah yang menyebabkan peningkatan belanja pemerintah daerah yang kurang efisien<sup>30</sup>. Hasil tersebut didukung oleh temuan Abdullah dan Halim bahwa *Flypaper Effect* juga menjadi masalah pada alokasi anggaran belanja modal di Bali, Sumatera, dan Jawa<sup>31</sup>.

Fenomena *flypaper effect* dan ketergantungan fiskal daerah yang besar kepada pemerintah pusat penulis yakini turut berkontribusi terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah seyogyanya dimaksimalkan pemerintah untuk meningkatkan proporsi penerimaan asli daerah. Sehingga harapannya, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat bersinergi dalam mencari dan mengoptimalkan berbagai sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana pemerintah pusat dan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

## **PENUTUP**

Pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil terbukti berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini menyimpulkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi telah dinikmati oleh berbagai golongan masyarakat, yang berdampak pada kenaikan taraf hidup kelompok miskin. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memiliki positif terhadap tingkat kemiskinan. Tren penurunan kesenjangan distribusi pendapatan pada periode 2010-2021 menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk. Hal ini juga diikuti tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota yang mengalami tren menurun di periode yang sama. Penurunan ini merupakan implikasi dari pembangunan ekonomi yang didukung oleh peran swasta serta dampak dari semakin berkualitasnya pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Hasil analisis menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat

seiring peningkatan kualitas hidup manusia yang meliputi angka harapan hidup, pendidikan, dan konsumsi perkapita rill. Di sisi lain, kapasitas fiskal yang terdiri atas transfer fiskal dan belanja publik selama tahun 2010-2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah inefisiensi anggaran dan alokasi yang belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap agar pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memihak kelompok miskin. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni mengembangkan sektor padat karya sebagai lapangan kerja utama bagi tenaga kerja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di samping itu, perlu adanya perbaikan akses pendidikan dan kesehatan yang menjangkau kelompok miskin di daerah.

Terakhir, pengawasan terhadap pengeluaran atau belanja pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa belanja pemerintah berjalan optimal dan tepat sasaran dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk menghindari terjadinya pemborosan maupun penyimpangan alokasi anggaran, upaya yang dapat diambil misalnya melakukan audit kinerja atas belanja sosial seperti tunjangan perumahan, pendidikan gratis, dan belanja kesehatan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Adapun bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian serupa, diharapkan mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain yang mampu menjelaskan fenomena kemiskinan dengan lebih komprehensif, baik dalam kajian terkait pengentasan kemiskinan di wilayah yang sama maupun di daerah lain di Indonesia.

## REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan,” 2022.
- [2] Agussalim, “Penanganan Kemiskinan di Sulawesi Selatan Pendekatan dan Agenda Kebijakan,” *Policy Pap.*, 2012.
- [3] K. H, “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia,” *J. Ekon. Pembang.*, vol. 9 (1), pp. 47– 63, 2004, [Online]. Available: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/624/550>
- [4] Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis*, 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 1999.

- [5] T. P. Michael., *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- [6] L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- [7] O. R. P. Yudha, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011,” Universitas Negeri Semarang, 2013.
- [8] R. Faturrohim, “Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan.,” UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- [9] Rustam, “Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan,” 2010.
- [10] A. T. Wijayanto, “Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 Å 2010,” *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 16, no. 2, pp. 418–428, 2016.
- [11] Barika, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera,” *J. Ekon. dan Perenc. Pembang.*, vol. 5, no. 3, 2013.
- [12] Mangilep, M. A. A., Naim, N. 2021 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **921** 012037. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/921/1/012037/meta>
- [13] K. Nisa, A. Wulandari, and R. L. Rahayu, “Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018,” *Sorot*, vol. 15, no. 1, p. 55, 2020, doi: 10.31258/sorot.15.1.55-63.
- [14] G. A. Nina and S. D. Rustariyuni, “Pengaruh Gini Rasio , Pengeluaran Non Makanan Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat,” *J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 18, no. 2, pp. 121–141, 2018.
- [15] Sofilda, et al., “Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression),” *OIDA Int. J. Sustain. Dev.*, 2016.
- [16] Napitupulu, S, “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara,” 2007.
- [17] D. Susilowati and M. S. W. Suliswanto, “Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia),” *J. Innov. Bus. Econ.*, vol. 6, no. 1, p. 89, 2015, doi: 10.22219/jibe.vol6.no1.89-106.
- [18] A. A. Rauf, “Kapasitas Fiskal dan PDRB dengan Tingkat Kemiskinan: Studi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,” *E-Jurnal Katalogis*, vol. 4, no. 10, 2016.
- [19] J. Sriyana, “Fiscal Capacity and Poverty Alleviation: A Panel Data Analysis for Yogyakarta Special Province, Indonesia,” *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. dan Pembang.*, vol. 16, no. 1, p. 1, 2015, doi: 10.23917/jep.v16i1.956.

- [20] Pou, et al., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kapasitas Fiskal, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2013,” 2015.
- [21] A. Iskandar and A. Subekan, “Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan (Determinant Analysis of Poverty in South Sulawesi),” *J. Tata Kelola Akuntabilitas Keuang. Negara*, vol. 2, no. 1, 2016.
- [22] D. Gujarati, *Basic Econometrics*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2009.
- [23] Manangkalangi, et al., “Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018),” *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 20, no. 3, 2020.
- [24] “Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi Ditopang oleh Provinsi Sulawesi Selatan,” *Databoks*, 2016. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/22/50-pertumbuhan-ekonomi-pulau-sulawesi-ditopang-oleh-provinsi-sulawesi-selatan>
- [25] H. Kakwani, N dan Son, “Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies,” *Pak. Dev. Rev.*, vol. 42, no. 4.
- [26] H. Sasana, “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia,” *J. Eko-Regional*, vol. 5, no. 2, 2010.
- [27] Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah,” Universitas Diponegoro, 2011.
- [28] R. dan L. S. Kanbur, “The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions,” 1999. [Online]. Available: <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>.
- [29] M. Armawaddin, W. Rumbia, and M. Afiat, “Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,” 2017, [Online]. Available: 18. 77. 10.21002/jepi.v18i1.773.
- [30] J. A. Wilde, “The Expenditure Effects of Grant-In-Aid Programs,” *Natl. Tax J.*, vol. 21, no. 3, 1968.
- [31] A. Syukriy and H. Abdul, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali,” 2003.